PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH

(Studi Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah)

RINGKASAN SKRIPSI

AKRAM RINALDI PRATHAMA
1117 29577

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA

SEPTEMBER 2021

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH

(Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi jawa Tengah)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

AKRAM RINALDI PRATHAMA

No Induk Mahasiswa: 111729577

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 22 September 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.)

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing	Penguji
Algifari, Drs., M.Si.	Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

Yogyakarta, 22 September 2021
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua

M. Jaluu Prajogo, Dr., M.B.A.

HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik STIE YKPN Yogyakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Akram Rinaldi Prathama
NIM: 1117 29577
Program Studi: Akuntansi
Jenis karya ilmiah: Skripsi
Demi pengembangan ilmu pengetahuan saya menyetujui untuk memberikan kepada STIE YKPN Yogyakarta Hak atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak ini STIE YKPN Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Yogyakarta
Pada tanggal: 22 September 2021
Yang menyatakan

Akram Rinaldi Prathama

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH

(Studi Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah)

ABSTRAK

Peran Pemerintah daerah dalam penyediaan layanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan nasional menjadi semakin besar. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti tentang pengaruh karakteristik pemerintah daerah (ukuran, tingkat kekayaan, tingkat ketergantungan dan belanja modal pemerintah daerah) dan temuan audit terhadap kinerja pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah diukur dengan skor hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) yang berasal dari laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD). Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah Kabupaten/Kota Jawa Tengah tahun 2018-2019 yang berjumlah 25 Kabupaten/Kota. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi data panel dengan bantuan aplikasi program *Eviews versi 10*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran daerah dan tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan untuk Tingkat ketergantungan pada pusat, belanja modal, dan temuan audit tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Kata Kunci: karakteristik pemerintah daerah, kinerja pemerintah daerah, laporan kinerja pemerintah daerah, evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD), temuan audit.

ABSTRACT

The role of local governments in providing public services and achieving national development goals is becoming increasingly large. Therefore, this study aims to provide evidence on the effect of local government characteristics (size, wealth level, dependency level and local government capital expenditure) and audit findings on local government performance. The performance of local government is measured by the score of the results of the evaluation of the performance of local government administration (EKPPD) which is derived from the report on the implementation of local government (LPPD). The sample used in this study was Central Java Regency/City in 2018-2019, totaling 25 Regencies/Cities. Hypothesis testing is done by using panel data regression. The results of this study indicate that the size of the region and the level of regional wealth have a positive effect on the performance of local governments, while the level of dependence on central government, capital expenditures, and audit have no effect on the performance of local governments.

Keywords: *characteristic of local government, local government performance, local government performance reporting, evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD), audit findings.*A

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

A. Pendahuluan

Setelah Indonesia melewati masa krisis ekonomi pada tahun 1998, Indonesia pun memulai era baru, yakni era otonomi daerah. Hal ini mendorong terjadinya perubahan sistem pemerintahan yang awalnya sentralistik menuju sistem pemerintahan desentralistik. Artinya, sebelumnya Pemerintah Daerah bergantung pada pemerintahan pusat dalam mengatur keuangannya menjadi daerah mengelola sendiri tanpa ketergantungan pada pemerintah pusat. Berdasarkan hal itu, TAP MPR No. XV/MPR/1998 mengenai Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengawasan, Pengalokasian serta Pemanfaatan Sumberdaya Nasional, dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Secara Adil pada Kerangka NKRI, ditetapkan MPR pada sidang istimewa yang diselenggarakan pada tahun 1998. TAP MPR No XV/MPR/1998 adalah dasar hukum diundangkannya UU No 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintah Daerah serta UU No 25 Tahun 1999 mengenai Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. (Hendraryadi, 2011), setelah itu UU No 22 Tahun 1999 diganti dengan UU No 32 Tahun 2004 yang memuat otoritas Pemerintah Daerah dalam mengatur serta mengelola daerahnya sesuai dengan asas otonomi.

Dalam PP No. 6/2008 menjelaskan jika tipe evaluasi Pemerintah Daerah yaitu Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD). Kemudian, diperkuat oleh Permendagri Nomor 73 Tahun 2009 (Permendagri No. 73/2009) mengatur mengenai tata cara penyelenggaraan evaluasi kinerja pelaksanaan Pemerintah Daerah serta Permendagri No. 74 Tahun 2009 mengenai pedoman pemberian apresiasi pelaksana Pemerintah Daerah (Sudarsana, 2013).

Laporan hasil EKPPD sendiri pertama dikeluarkan pada tahun 2009 oleh Kementrian Dalam Negeri pada LPPD tahun 2007. Dalam EKPPD evaluasi penilaian dibuat dengan metode memperhitungkan jumlah indeks komposit kinerja. Dalam hal ini pelaksanaan Pemerintah Daerah

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

adalah penjumlahan dari hasil penilaian yang melingkupi indek pencapaian kinerja serta indeks kesesuaian materi. Indeks pencapaian kinerja dinilai menggunakan variabel Indeks Komposit Kinerja (IKK) dalam tingkatan pengambilan kebijakan serta pelaksanaan kebijakan.

Penelitian ini berdasarkan penelitian terdahulu yang dilaksanakan Sudarsana (2013). Kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ukuran pemerintahan daerah, taraf kekayaan daerah, taraf ketergantungan terhadap pemerintah pusat, temuan audit BPK dan belanja modal digunakan menjadi variabel penelitiannya (Sudarsana, 2013).

Berdasar latar belakang yang telah diuraikan, peneliti mempunyai ketertatikan membuat penelitian dengan topik "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah)"

B. Kajian Teori

1. Otonomi daerah

Otonomi daerah yang dijelaskan pada UU No. 32 Tahun 2004, mengenai Pemerintah Daerah dapat bebas untuk mengolah sumberdaya alam daerahnya dengan efisien dan efektif, dengan memperhatikan juga aspek-aspek yang berkaitan dengan pemerintah pusat serta Pemerintah Daerah, agar terjadi keselarasan diantara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah pusat dalam membuat peraturan yang mendukung Pemerintah Daerah dalam mengatur daerahnya dengan baik.

2. Pemerintah Daerah

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Stewardship theory yang dikutip oleh Ara, Herwanti, dan Pituringsih (2016) menyebutkan Pemerintah Daerah dipandang dapat melakukan kepentingannya dengan baik yang sudah seperti diamanahkan, menjalankan sistem pemerintahan demi kepentingan publik guna tujuan ekonomi, pelayanan publik, dan demi kesejahteraan masyarakat agar bisa terpenuhi. Dalam UU No.32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah diwajibkan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dijalankan dengan menyusun LPPD yang akan diberikan pada pemerintah pusat. Pembuatan LPPD bertujuan demi pertanggungjawaban Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan prestasi daerah dalam tata kelola kepada masyarakat.

3. Ukuran Daerah

Dalam penelitian Ramdhani (2016) Ukuran daerah dinyatakan dengan besarnya aset yang dipunyai oleh daerah. Semakin besar aset yang dikelola oleh daerah dapat disimpulkan bahwa daerah tersebut memiliki pengelolaan yang baik juga. Berdasarkan hal itu Pemerintah Daerah mempunyai wilayah yang luas memiliki banyak sekali tekanan untuk melaporkan kinerja keuangan bahwa apa yang mereka laksanakan selaras terhadap apa yang diharapkan atau memiliki laporan yang positif.

4. Tingkat kekayaan daerah

Kekayaan Daerah menurut UU No.33 tahun 2004 menyatakan bahwa PAD adalah penghasilan daerah yang ditemukan dari daerah itu guna menjadi modal dasar pembiayaan pembangunan serta usaha daerah dalam mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat. Tingkat kekayaan daerah berhubungan erat dengan PAD yang bersumber dari sumberdaya yang asalnya dari daerah tersebut yang kemudian diproyeksikan dengan PAD.

5. Tingkat Ketergantungan Pada Pusat

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah pada pusat bisa dilihat melalui cara melihat besaran DAU. Sesuai dengan UU No.33 Tahun 2004 disebutkan, DAU merupakan biaya yang dialokasikan dari penerimaan APBN yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan diantar daerah sebagai upaya desentralisasi guna menyediakan biaya untuk kebutuhan daerah. Menurut Noviyanti dan Kiswanto (2016) pelaksanaan DAU akan dipantau pemerintah pusat supaya Pemerintah Daerah bisa semakin terpacu lagi meningkatkan kinerja keuangan daerahnya.

6. Belanja Modal

Belanja modal sesuai dengan penjelasan PP Nomor 71 Tahun 2010, Belanja modal adalah belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah kekayaan atau kekayaan daerah sekaligus meningkatkan belanja rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

7. Audit Pemerintah

Audit pada pemerintahan adalah salah satu hal yang penting yang berada pada pemerintahan guna menjalankan sistem good government. Menurut Aikins (2012, dalam Mahmudah dan LS, 2016) proses audit pada pemerintahan itu penting guna memastikan akuntabilitas LKPD.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan sebab penelitian ini menggunakan data numerik untuk menguji hipotesis penelitian. Alat statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistika deskriptif dan statistika indukti. Statistiika deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran tentang nilai rata-rata, nilai maksumum, nilai minimum, dan statndar deviasi data penelitian. Statistika induktif digunakan untuk menguji hipotesis penelitian, yaitu analisis regresi berganda. Data penelitian diolah menggunakan program

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

aplikasi statistik EViews untuk memperoleh nilai statistik yang diperlukan dalam analisis deskriptif dan analisis induktif.

Pada Penelitian ini akan menggunakan beberapa variabel, yaitu:

1. Variabel Dependen

Variabel Dependen merupakan variabel yang mendapat pengaruh ataupun bergantung dengan variabel yang lainnya. Kinerja Pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam hal ini menjadi variabel dependennya (Y).

2 Variabel Independen

Variabel Independen merupakan variabel yang memberi pengaruh pada variabel lainnya. Ukuran daerah (X1), tingkat kekayaan daerah (X2), tingkat ketergantungan pada pusat (X3), belanja modal (X4), serta temuan audit BPK (X5) dalam penelitian ini digunakan menjadi variabel independen.

Definisi Operasional

1. Kinerja Pemerintah Kabupaten /Kota

Skor kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang asalnya dari laporan hasil evaluasi pemeringkatan kinerja pelaksanaan Pemerintah Daerah sesuai LPPD tahun 2018-2019 skala nasional dalam *range* nilai 0-4. Evaluasi dilaksanakan sesuai penilaian *portofolio* dengan *desk evaluation* pada data yang tercantum pada LPPD tahun 2018-2019 serta penilaian lapangan pada prestasi kinerja yang diraih tiap-tiap Pemerintah Daerah.

2. Ukuran Daerah

Definisi ukuran daerah dalam penelitian adalah definisi yang dipakai dalam penelitian Ramdani (2016). Dalam penelitiannya Ramdhani (2016), ukuran daerah dinyatakan dengan besarnya aset

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yang dipunyai oleh daerah. Dalam penelitian ukuran daerah pengukurannya dilakukan dengan rumus berikut

$$\text{Ukuran daerah} = \text{Ln (total aset)}$$

3. Tingkat Kekayaan Daerah

Kekayaan daerah pada penelitian ini dinilai menggunakan PAD. UU No.33 tahun 2004 menjelaskan jika PAD ialah penghasilan daerah yang diambil dari daerah itu guna menjadi modal dasar pembiayaan pembangunan serta usaha daerah dalam mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk mengukur kekayaan daerah pada penlitian:

$$\text{Tingkat kekayaan daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$$

4. Tingkat Ketergantungan pada Pusat

Tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah pada pusat bisa dilihat melalui cara melihat besaran DAU. Dalam UU No.33 Tahun 2004 disebutkan, DAU merupakan uang yang dialokasikan dari penerimaan APBN yang memiliki tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan tiap daerah sebagai upaya desentralisasi guna menyediakan biaya untuk kebutuhan daerah. Berikut adalah rumus dalam mengukur tingakt ketergantungan terhadap pusat:

$$\text{Tingkat ketergantungan pada pusat} = \frac{\text{Dana Alokasi Umum}}{\text{Total Pendapatan}}$$

5. Belanja Modal

Belanja Modal dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan Belanja modal adalah belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah kekayaan atau kekayaan daerah sekaligus meningkatkan belanja rutin seperti biaya pemeliharaan pada

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap bagi pemerintah daerah, seperti peralatan, infrastruktur, dan aset tetap lainnya.

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}}$$

6. Temuan Audit BPK

Audit pada pemerintahan menjadi salah satu hal yang penting pada pemerintahan guna menjalankan sistem *good government*. Menurut Aikins (2012, dalam Mahmudah dan LS, 2016) proses audit pada pemerintahan itu penting guna memastikan akuntabilitas LKPD. Temuan audit BPK yang dimuat dalam Opini-BPK RI merupakan bentuk dari pemeriksaan yang dilaksanakan BPK berdasarkan laporan keuangan Pemerintah Daerah, yang mana ditemukan adanya pelanggaran pada pengendalian Intern daerah dan juga pelanggaran atas perundang-undangan yang sedang berlaku.

$$\text{Temuan audit} = \frac{\text{Temuan Audit (dalam rupiah)}}{\text{Total Anggaran Belanja}}$$

D. Teknik Pengolahan Data

1. Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif mencerminkan sekumpulan data yang spesifik dengan meringkasnya secara singkat mengenai sampel dan ukuran datanya. Statistik deskriptif terdiri dari ukuran tendensi sentral (rata-rata, median, serta modus) serta ukuran variabilitas. Alat analisisnya yaitu nilai rata-rata, standar deviasi, minimal, serta maksimal.

2. Uji Asumsi Klasik

2.1 Uji Multikolinieritas

Tujuannya untuk mendeteksi apakah model regresinya yang diperoleh memiliki hubungan linear yang kuat diantara variabel bebas yang satu terhadap yang lainnya. Model yang baik semestinya tidak berkorelasi antara variabel bebasnya jadi pentingnya diadakan pengujian ini terjadinya

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

multikolinearitas bisa dideteksi dengan melihat nilai VIF. Menurut Widarjono (2018, 108) nilai VIF ≥ 10, memperlihatkan terjadinya multikolinieritas. Kalau nilai VIF ≤ 10 artinya tidak mengalami multikolinieritas.

2.2 Uji Otokorelasi

Dalam Uji Bertujuan untuk melihat apakah pada model regresinya terjadi kesalahan residual dalam periode t dalam residual periode t sebelumnya. Hal tersebut akan mengakibatkan konsekuensi yaitu interval keyakinan menjadi makin luas dan varian serta kesalahan standar akan diprediksi sangat kecil. Regresinya yang baik semestinya tidak mengalami gejala autokorelasi. Analisisnya menggunakan uji Breusch Godfrey, jika nilai signifikansinua > 0.05 hal tersebut berarti tidak mengalami otokolerasi dalam model regresinya.

2.3 Uji Heterokesdastisitas

Uji Heterokesdastisitas menurut Widarjono (2018, 113) "Heteroskedastisitas adalah varian variabel gangguan yang tidak konstan". Uji heteroskedastisitas sendiri memiliki beberapa metode untuk menentukan heterokesdastisitas, yaitu dengan uji glejser, uji white, uji park, dan dengan membandingkan diantara model terpilih tanpa pembobotas (*unweighted*) dan model terpilih dengan pembobotan (*weighted*), jika model terpilih tanpa pembobotan terdapat masalah heteroskedastisitas. Apabila nilai statistik F p-value model terpilih dengan pembobotan lebih kecil dari model tanpa pembobotan dengan kriteria < 0,05, maka hasil ini lebih baik dibandingkan dengan model tanpa pembobotan. Begitupun dengan koefisien determinasi model terpilih dengan pembobotan, apabila lebih baik daripada nilai statistik model terpilih tanpa pembobotan, jadi model yang dipakai yaitu model terpilih dengan pembobotan.

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Analisis Data Panel

Dalam hal ini analisis datanya dilakukan dengan metode regresi data panel, yakni perpaduan Data *cross section* dengan data *time series* (Widarjono, 2018, p. 363). Melalui observasi yang berulang pada data *cross section* yang memadai, analisis data panel membuat individu mempelajari dinamika perubahan melalui data time series. Ada tiga jenis pendekatan dalam memperkirakan model menggunakan data panel:

1. *Common Effect*

Model ini memadukan data *cross section* dan *time series* menjadi satu kesatuan tanpa mempertimbangkan terdapatnya ketidaksamaan waktu dan individu (Widarjono, 2018, p. 365).

2. *Fixed Effect*

Model ini menganggap bila intersep dari tiap individu yaitu tidak sama sementara *slope*-nya konsisten (Widarjono, 2018, p. 366).

3. *Random Effect*

Model *random effect* menganggap tiap perusahaan memiliki ketidaksamaan intersep, dimana intersep itu merupakan variabel random (Widarjono, 2018, p. 370).

Menurut Widarjono (2018, 372) ada tiga pengujian dalam penentuan teknik estimasi data panel, yakni Uji Chow, Uji *Hausman*, dan Uji B-P Lagrange Multiplier.

3.1 Uji Chow

Uji Chow dipakai dalam menguji apakah teknik regresi data panel menggunakan *fixed effect* semakin baik dibanding dengan *common effect* (Widarjono, 2018, p. 372). Hipotesis dalam uji Chow yaitu:

Ho: Model regresi data panel *common effect*.

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Ha: Model regresi data panel *fixed effect*.

Bila nilai probabilitas *cross section* F > α (0,05) artinya menerima Ho maknanya model yang sesuai yakni *common effect*. Bila *cross section* F lebih kecil daripada α (0,05) jadi Ho ditolak yang berarti model yang sesuai yaitu *fixed effect* (Ghozali, 2017 dalam Tanjung, 2019).

3.2 Uji Hausman

Uji ini dipakai dalam mengetahui apakah menggunakan model regresi data panel *fixed effect* atau *random effect* (Widarjono 2018, 375). Hipotesis dalam pengujian Hausman yaitu:

Ho: Model regresi data panel *random effect*.

Ha: Model regresi data panel *fixed effect*.

Bila nilai signifikansinya *cross section random* > α (0,05) serta *Chi-Sq. Statistic* dibawah dari *Chi-Sq Table* maka Ho tidak dapat ditolak yang artinya model yang sesuai yaitu *random effect*. bila nilai probabilitas *cross section random* dibawah daripada α (0,05) serta *Chi-Sq. Statistic* lebih besar daripada *Chi-Sq Table* maka Ho ditolak, yang artinya model yang sesuai yaitu *fixed effect* (Ghozali, 2017 dalam Tanjung, 2019).

3.7.3.3 Uji B-P Lagrange Multiplier

Uji B-P Lagrange Multiplier (LM Test) dilaksanakan dalam membandingkan model yang paling baik diantara *random effects* model serta *common effects* model. Sehingga disusun hipotesis berikut ini:

H0: *Common Effects* Model

H1: *Random Effects* Model.

Dasar pengambilan kesimpulan dalam uji ini adalah: a. Apabila nilai Breusch-Pagan < 0,05, jadi menolak Ho maknanya random effects model semakin baik agar dipakai. bila nilai Breusch-Pagan > 0,05, jadi menerima Ho maknanya *common effects* model semakin baik agar dipakai.

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam hal ini, peneliti memakai data regresi panel. Karena, data dalam penelitian ini yaitu perpaduan diantara data *cross-section* dan data *time series* (Widarjono 2018, 9). Model regresi dirumuskan yakni:

$$Y = \beta0 + \beta1X1 + \beta2X2 + \beta3X3 + \beta4X4 + \beta5X5 + \varepsilon$$

Dengan:

Y: Kinerja Pemerintah Daerah Kbupaten/Kota di Jawa Tengah

β0: Intersep atau Konstanta

β1, β2, β3, β4, β5: Tingkat kemiringan garis regresi atau koefisien regresi

X1: Ukuran Daerah

X2: Tingkat Kekayaan Daerah

X3: Tingkat Ketergantungan pada Pusat

X4: Belanja Modal

X5: Temuan Audit BPK

ε: *Error terms*

5. Uji Statistik F

Dalam uji ini memiliki tujuannya untuk mengujikan apakah semua variabel bebasnya mampu menjelaskan variabel terikat. Derajat kepercayaan yang dipakai yaitu 5%. Hasil uji F ditunjukkan pada kolom sig. Misal kita memakai taraf sig 5% (0,05), bila nilai probabilitas < 0,05 yang berarti bisa disebutkan seluruh variabel bebasnya bisa menerangkan variabel terikatnya. Akan tetapi bila nilai signifikansinya > 0,05 jadi semua variabel bebasnya tidak dapat menjelaskan variabel terikatnya (Nugroho, 2014). Bila signifikansinya > 0.05 (α) atau F hitung < F tabel artinya hipotesis tidak terbukti jadi H0 diterima H1 ditolak.

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

6. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan serentetan alat statistik yang bisa dipakai dalam mengukur sejauhmana variabel bebas bisa menguraikan variabel terikat (Algifari, 2018, p. 200). Koefisien determinasi (R^2) tujuannya agar mengetahui tingkat ketepatan model regresi estimasi. Nilai koefisien regresi diantara nol hingga satu. Jika nilainya hampir nol, makin rendah kemampuan seluruh variabel bebas menguraikan variabel terikat. Makin mendekati satu, makin tinggi kemampuan semua variabel bebasnya menguraikan variabel terikatnya.

7. Uji Statistik t

Uji-t adalah jenis uji statistika dalam melihat pengaruh sebuah variabel bebasnya terhadap variabel terikatnya. Sebuah variabel bebas diketahui mempengaruhi variabel terikat bila probabilitas nilai t kurang dari 0,05. Uji t dapat juga dapat menggunakan nilai t hitung terhadap nilai t tabel. Apabila nilainya t hitung > t tabel memperlihatkan variabel bebasnya mempengaruhi variabel terikatnya.

E. Hasil Pengolahan Data

Sebelum menjalankan uji hipotesis penelitian lebih dulu dilakukan uji kemampuan semua variabel bebasnya menerangkan variabel terikat menggunakan uji F serta mengukur kemampuan semua variabel bebasnya menguraikan variabel terikatnya dengan nilai koefisien determinasi (R2).

1. Uji F

Uji F dipakai agar mengetahui apakah Ukuran daerah, Tingkat kekayaan daerah, Tingkat ketergantungan terhadap pusat, Belanja Modal, serta Temuan Audit mampu menjelaskan kinerja

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah. Hasil uji F bisa diketahui dalam Tabel 4.14 yakni:

Tabel 4.14: Nilai Statistik Uji F

Prob(F-statistic)	0,000000

Sumber: data diolah peneliti (2021)

Berdasar Tabel bersangkutan bisa kita lihat bila, nilai probabilitas F hitung yaitu 0,0000. Dikarenakan nilai probabilitasnya F hitung dibawah 0,05, jadi kesimpulannya Ukuran daerah, Tingkat kekayaan daerah, Tingkat ketergantungan terhadap pusat, Belanja Modal, serta Temuan Audit mampu menjelaskan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah.

2. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi ini dilakukan agar dapat melihat besarnya kemampuan seluruh variabel bebasnya pada penelitian menerangkan variabel terikat. Tabel 4.15 berisi nilai koefisien determinasi model common effects dengan pembobotan.

Tabel 4.15
Koefisien Determinasi

R-squared	0,810782

Sumber: data diolah peneliti (2021)

Tabel di atas memperlihatkan jika nilainya R-Squared sebesar 0.810782. Nilai itu bisa diinterpretasikan bahwa X1, X2, X3, X4, serta X5 dengan simultan bisa menjelaskan Y yaitu 81,07% dan sisanya sebesar 18,93% dipaparkan dari faktor-faktor lain diluar variabel bebas pada penelitian ini.

3. Uji t

Uji t dipakai dalam menguji hipotesis penelitian. Dalam uji t jika t hitung diatas t tabel artinya Ho ditolak ataupun variabel x memiliki pengaruh positif pada variabel Y. sebaliknya bila t hitung kurang dari t tabel artinya H0 diterima. Tabel 4.16 berikut ini menyajikan nilai statistik uji t.

Tabel 4.16

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Nilai Statistik Uji t dan Hasil Pengujian

Variabel	t hitung	Sig.	Keterangan	Hipotesis
Konstanta	1,932268	0,0598	-	
Ukuran daerah	2,067079	0,0446	Berpengaruh positif	Hipotesis terbukti
Tingkat kekayaan daerah	5,563254	0,0000	Berpengaruh positif	Hipotesis terbukti
Tingkat ketergantungan pada pusat	1,243557	0,9416	Tidak berpengaruh positif	Hipotesis tidak terbukti
Belanja Modal	-0,508735	0,6135	Tidak berpengaruh positif	Hipotesis tidak terbukti
Temuan Audit	12,81610	0,0000	Tidak berpengaruh negatif	Hipotesis tidak terbukti
T tabel = 1.67655				

Sumber: data diolah peneliti (2021)

Dari tabel tersebut maka hasil uji statistik t ialah:

1. Variabel Ukuran Daerah (X1) memiliki nilai t hitung yaitu 2,0670 dan nilai Sig. 0,0446. Nilai t hitung diatas t tabel. Nilai Sig. kurang dari 0,05 memperlihatkan Ukuran Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Hipotesis pertama (H1) terbukti.
2. Variabel Tingkat Kekayaan Daerah (X2) memiliki nilai t hitung dan Sig masing – masing sebesar 5,5632 dan 0,000. Nilai t hitung > t tabel serta nilai Sig. < 0,05. Hasil uji itu membuktikan Tingkat Kekayaan Daerahberpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hipotesis kedua (H2) terbukti.
3. Variabel Tingkat Ketergantungan terhadap Pusat (X3) dengan nilai t hitung yaitu 1,2435 dan nilai Sig. yaitu 0,9416. Nilai Sig. lebih dari 0,05 menunjukkan Tingkat Ketergantungan terhadap Pusat tidak berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hipotesis ke tiga (H3) tidak terbukti.
4. Variabel Belanja Modal (X4) memiliki nilai t hitung san nilai Sig. berturut-turut sebesar -0,5087 dan 0,613. Nilai Sig. diatas daripada 0,05. Hasil pengujian itu menunjukkan Belanja

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Modal tidak berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hipotesis ke empat (H4) tidak terbukti

5. Variabel Temuan Audit BPK (X5) mempunyai nilai t hitung serta Sig. masing – masing yaitu 12,8161 dan 0,000. Nilai t hitung > t tabel serta nilai Sig <0,05. Hasil uji ini menunjukkan Temuan Audit BPK tidak berpengaruh negatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hipotesis ke lima (H5) tidak terbukti.

F. Kesimpulan

Penelitian memiliki tujuan dalam mengetahui lebih lanjut tentang Pengaruh karakteristik Pemerintah Daerah serta temuan audit BPK pada kinerja Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2019. Sesuai dengan hasil yang diteliti serta pembahasan yang sudah dijelasakan dalam bab sebelumnya, kemudian bisa diberikan kesimpulan yaitu

1. Ukuran daerah dan tingkat kekayaan daerah berpengaruhi positif terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Artinya makin besar ukuran daerah dan tingkat kekayaan daerah maka makin baik juga kinerja yang akan dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Temuan audit tidak berpengaruh negatif terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Artinya hasil dari olah data temuan audit tidak sesuai dengan teori yang digunakan pada penelitian ini dan hipotesis tidak terbukti.
3. Tingkat ketergantungan terhadap pusat dan belanja modal tidak berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Artinya kenaikan DAU dan belanja modal tidak memiliki pengaruh pada kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dari kesimpulan diatas dengan menggunakan sampel yang berjumlah 25 Kabupaten/Kota Di Jawa tengah dan dengan rentang tahun 2018-2019, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk Temuan Audit, Tingkat Ketergantungan terhadap pusat, dan belanja modal perlu penelitian lebih dalam lagi agar memberikan hasil yang lebih baik, dengan menggunakan Rentang waktu yang lebih Panjang dan lebih banyak sampel yang digunakan.

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

Aikins, S. (2011). An examination of government internal audits' role in improving financial performance. *Public Finance and Management*, 306-337.

Algifari. (2018). *Statistika Deskriptif Plus.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Ara, S. C., Herwanti, T., & Pituringsih, E. (2016). PENGARUH KARAKTERISTIK PEMDA DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PEMDA KABUPATEN DI PULAU SUMBA. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*.

Armaja, Ibrahim, R., & Aliamin. (2015). PENGARUH KEKAYAAN DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN(studi pada Kabupaten/kota di Aceh). *JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM*, 2.

Aziz, A. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*.

Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik.* Jakarta: Erlangga.

Cahyadi, A. (2016, 9 8). *Perbedaan Auditor Internal dan Auditor Eksternal*. Retrieved from Satuan pengawasan Internal (SPI) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: http://spi-blu.uinjkt.ac.id/?p=754

Dharma , F., & Martani, D. (2016). Pengaruh Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Dan Kapasitas Keuangan Daerah Terhadap Keterpilihan Kepala Daerah Incumbent Pada Pemilukada.

Efendy, M. T. (2010). PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, DAN MOTIVASI TERHADAP KUALITAS AUDIT APARAT INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH. *Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO*.

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Hasanah, N., & Fauzi, A. (2017). *Akuntansi Pemerintahan*. Bogor: In Media.

Hendraryadi, S. (2011). PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH ANTARA TAHUN 2008 - 2009. 14.

Juweny, S. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia. *Doctoral dissertation, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS*.

Kusumawardani, M. (2012). PENGARUH SIZE, KEMAKMURAN, UKURAN LEGISLATIF, LEVERAGE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA. *Accounting Analysis Journal*, 2.

Mahmudah, H., & LS, B. R. (2016). KEEFEKTIFAN AUDIT INTERNAL PEMERINTAH DAERAH. *Jurnal Akuntansi*.

Marfiana, N., & Kurniasih, L. (2013). PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN HASIL PEMERIKSAAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA. *Sustainable Competitive Advantage*.

Mustikarini, W. A., & Fitriasasi, D. (2012). Pengaruh Karakteristik pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi 15*.

Noviyanti, N. A., & Kiswanto. (2016). PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH, TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *Accounting Analysis Journal*.

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Nugroho, R. A. (2014). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*.

Oktasari, M. (2017). PENGARUH KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN. *Doctoral dissertation, POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA*.

Prakosa, K. B. (2004). ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP PREDIKSI BELANJA DAERAH (STUDI EMPIRIK DI WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH DAN DIY). *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*.

Qowi, R., & Prabowo, T. W. (2017). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan pemeriksaan BPK terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun anggaran 2012. *Diponegoro Journal of Accounting*.

Ramdhani, D. (2016). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI PROPINSI BANTEN. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*.

Sari, I. P. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kab/kota Pulau Sumatra). *Doctoral dissertation, Riau University*.

Sudarsana, H. S. (2013). PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH. 19.

Sumarjo, H. (2010). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Syafii, M. (2015, February 2). *Analisis regresi: model data panel*. Retrieved from DIAS: https://www.diassatria.com/analisis-regresi-model-data-panel/

Tanjung, Y. B. (2019). PENGARUH STUKTUR KEPEMILIKAN MANAJERIAL, RETURN ON ASSET, CURRENT RATIO, DEBT TO TOTAL ASSET DAN GROWTH OPPORTUNITIES TERHADAP KONSERVATISME AKUNTANSI (Studi Empiris pada Indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017). *Doctoral dissertation*.

Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya Disertai. Panduan Eviews.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Zaky, A. (2015). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Daerah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*.

repository.stieykpn.ac.id